

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan tentang penyaluran kerja lulusan SMK melalui BKK di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan:

Pertama, Peran Bursa Kerja Khusus SMK di Kota Yogyakarta dalam penyaluran kerja lulusan menurut pengurus (52,4%) dan menurut alumni (72,9%) termasuk dalam kategori Baik. Peran BKK SMK tersebut mencakup:

- a. Pelayanan informasi pasar kerja BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus (53,8%) dan menurut alumni (62,5%) termasuk dalam kategori Baik. Pelayanan informasi pasar kerja dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup: pendataan terhadap pencari kerja, pendataan, pencarian informasi lowongan kerja, serta penyampaian informasi lowongan pekerjaan. Pengurus BKK telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan IPK.
- b. Pelayanan bimbingan jabatan BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus (45,0%) dan menurut alumni (81,3%) termasuk dalam kategori Baik. Pengurus BKK memberikan bekal kepada siswa/lulusan sebelum terjun ke dunia kerja melalui bimbingan secara kolosal maupun konsultasi secara personal.
- c. Pelayanan perantara kerja BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus (55,0%) dan menurut alumni (75,0%) termasuk dalam kategori Baik. Pengurus

BKK memberikan pelayanan kepada pemberi kerja dan pencari kerja, serta menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada dinas terkait.

- d. Pengelolaan kerjasama dengan dunia industri oleh BKK SMK di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 50,0%. BKK menjalin kerjasama dengan dunia industri melalui berbagai program, salah satunya adalah kerjasama pelaksanaan tes rekrutmen/penempatan tenaga kerja.
- e. Penelusuran lulusan yang dilaksanakan oleh BKK SMK di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik dengan skor 58,4%. Pengurus BKK melakukan persiapan penelusuran lulusan sejak sebelum siswa lulus dari sekolah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah lulusan yang belum dapat ditelusuri oleh pengurus BKK.

Kedua, penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus SMK di Kota Yogyakarta ditinjau dari aspek kelembagaan BKK menurut pengurus (43,1%) dan hasil observasi (50,0%) termasuk dalam kategori Baik. BKK SMK di Kota Yogyakarta telah memiliki izin dan secara resmi terdaftar sebagai lembaga perantara kerja, dibuktikan dengan surat tanda daftar/surat persetujuan dari Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Ketiga, faktor pendukung dan faktor penghambat BKK SMK di Kota Yogyakarta dalam menyalurkan lulusan ke dunia kerja, meliputi:

- a. Faktor pendukung

- 1) Fasilitas BKK

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan sekretariat, komputer, tempat seleksi, dan pelengkapan lainnya.

2) Program kerjasama

Adanya kerjasama yang baik antara BKK dengan dunia industri. Adanya kerjasama orang tua siswa agar anaknya dapat bekerja.

b. Faktor penghambat

1) Sumber Daya Manusia pengelola BKK

Jumlah pengurus BKK di beberapa sekolah belum cukup untuk melaksanakan semua tugas BKK. Belum semua pengurus BKK pernah mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman dalam mengelola BKK. Selain mengelola BKK, pengurus BKK memiliki beban kerja lain sebagai pengajar sehingga terkadang berbenturan dengan kepentingan BKK.

2) Anggaran

Belum semua BKK memiliki alokasi anggaran khusus dalam pelaksanaan program BKK.

3) Lulusan

Sebagian siswa tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh industri. Persaingan antar sesama lulusan cukup tinggi sementara lowongan pekerjaan yang tersedia terbatas. Banyak lulusan yang memilih melanjutkan studi/kuliah.

B. Implikasi

Hasil penelitian yang menggambarkan pelaksanaan peran BKK serta faktor pendukung dan faktor penghambat BKK SMK di Kota Yogyakarta dalam penyaluran kerja lulusan berimplikasi pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan BKK SMK di Kota Yogyakarta. Informasi mengenai faktor

pendukung dan penghambat BKK merupakan informasi yang berharga bagi pemangku kebijakan serta pengurus BKK SMK di Kota Yogyakarta. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan sekolah, berkaitan dengan pengelolaan BKK SMK.

Berdasarkan informasi tersebut, diharapkan pengurus BKK SMK dapat memperkuat faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan peran BKK seperti peningkatan fasilitas guna menunjang pelaksanaan BKK, memperkuat kerjasama dengan instansi terkait dan dunia industri, serta melibatkan orang tua siswa dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan pada siswa. Informasi mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan BKK dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan perbaikan dalam pengelolaan BKK SMK di Kota Yogyakarta dengan meminimalisir faktor-faktor tersebut.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Siswa perlu lebih aktif memanfaatkan keberadaan BKK dalam memperoleh informasi mengenai dunia kerja, serta dalam rangka memperoleh pekerjaan sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.
2. Pengurus BKK dan pimpinan sekolah perlu mempertimbangkan penyesuaian struktur organisasi dan jumlah pengurus BKK dengan peraturan yang berlaku yaitu 8 orang dengan pembagian tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 039 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

3. Pengurus BKK meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus BKK melalui program-program pelatihan pengelolaan BKK dan pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penyaluran lulusan SMK ke dunia kerja.
4. Pengurus BKK perlu lebih aktif mencari informasi lowongan pekerjaan dan tidak hanya menunggu informasi datang dari industri. Selain itu, pengurus BKK perlu mendorong minat siswa untuk berwirausaha dan memfasilitasinya dalam bentuk program atau pelatihan sehingga semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta.
5. Pimpinan sekolah perlu mempertimbangkan untuk menempatkan karyawan/petugas khusus yang mengurusi Bursa Kerja Khusus yang tidak memiliki tugas mengajar sehingga dapat lebih optimal dalam mengelola kegiatan BKK dalam rangka menyalurkan lulusan ke dunia kerja.
6. Pimpinan sekolah perlu memberikan alokasi anggaran khusus bagi pelaksanaan program-program BKK untuk menjamin keterlaksanaan serta memudahkan pengurus BKK dalam melaksanakan program tersebut.